

**SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2019**

Jakarta, 21 November 2019

- Yth. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;**
 - Yth. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;**
 - Yth. Deputi Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;**
 - Yth. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter, Bank Indonesia;**
 - Yth. Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Dalam Negeri**
 - Yth. Bapak/Ibu Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Pelaksana Harian Ketua TPID atau yang mewakili, serta**
- Hadirin dan undangan yang berbahagia.**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita
semua,**

Mengawali sambutan ini, perkenalkan Saya mengajak saudara-saudara untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta hidayah-Nya kita dapat dipertemukan pada hari ini tanggal 21 November 2019, untuk mengikuti acara pembukaan **“RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2019”** dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin yang Saya hormati,

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini, sangat penting artinya dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi beberapa waktu yang lalu, kemudian selain daripada itu Rakorpusda TPID tahun 2019 yang mengangkat tema **“Sinergi dan Inovasi Dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan Dan Kelancaran Distribusi Pangan Di Daerah”**, juga sebagai forum untuk bertemu

dan berdiskusi serta saling memberikan masukan terhadap berbagai hal terkait dengan pengalaman yang telah dilakukan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, kita mengharapkan untuk penjabaran lebih lanjut terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan pengendalian inflasi di daerah. Sesuai dengan tema, bahwa rakorpusda ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap sinergi dan inovasi yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah, dalam upaya pelaksanaan program peta jalan pengendalian inflasi 2019-2021. Adapun fokus utama strategi pencapaian sasaran inflasi tahun 2019 ini adalah untuk mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan masalah pangan.

Untuk itu, Saya meminta kepada seluruh Daerah melalui TPID agar berperan aktif berinisiasi melakukan sinergi dan inovasi terkait dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, dengan:

1. mengoptimalkan infrastruktur pertanian dan logistik melalui sinergitas program dukungan pemerintah dan pemerintah daerah;
2. mengembangkan model kerjasama perdagangan antar daerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. memperluas inovasi penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian, pemasaran dan juga memperlancar distribusi; serta
4. melakukan *Amati, Tiru, dan Modifikasi* (ATM) kepada program-program kerja TPID lain sebagai salah satu pertimbangan penyusunan program kerja TPID.
5. mensinkronkan program peta jalan pengendalian inflasi dengan program/kegiatan perangkat daerah yang terkait, serta mengintegrasikan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, sehingga kegiatan pengendalian inflasi dapat terlaksana dengan baik.

Hadirin yang Saya hormati,

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang terlampau tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, selain itu membuat daya beli masyarakat turun, dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan, yang kemudian akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi sisi penawaran, antara lain berkaitan dengan gangguan produksi, distribusi, serta kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor ataupun harga komoditas strategis, termasuk bahan bakar dan komoditas energi lainnya. Oleh karenanya dalam menjaga angka inflasi, perlu kita memperhatikan dua faktor sekaligus, yaitu level inflasi yang membuat denyut perekonomian bisa optimum,

serta sekaligus tidak membuat daya beli masyarakat menjadi turun.

Menyikapi akan hal tersebut, maka perlu kiranya kita terus memperkuat kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan makro ekonomi yang terintegrasi, baik itu dilakukan melalui kebijakan fiskal, moneter maupun kebijakan sektoral. Dengan demikian bahwa koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari berbagai tingkat pemerintahan, diharapkan akan dapat lebih efektif bukan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah, tetapi juga berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Hadirin yang berbahagia,

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah mempunyai target atau sasaran inflasi yang harus dicapai.

Sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah pada 2019 sebesar $3,5\% \pm 1\%$. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi ke depan, sehingga tingkat inflasi dalam kondisi terkontrol dan stabil, akan dapat mendukung daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, bahwa Indonesia mengalami kenaikan serta penurunan angka inflasi pada setiap tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir, yaitu sejak 2016 - 2018 menunjukkan bahwa inflasi yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,61% year on year (tahun ke tahun), tahun 2016 sebesar 3,02% year on year (tahun ke tahun), dan tahun 2018 sebesar 3,13%. Adapun di tahun 2019, sampai dengan akhir bulan September 2019 terhadap Desember 2018 sebesar 2,20 % dari target pemerintah sebesar $3,5\% \pm 1\%$ sampai dengan desember 2019.

Hadirin yang saya hormati,

Bahwa dalam upaya untuk mendukung penguatan kapasitas institusional, penguatan koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang telah ditindak lanjuti dengan beberapa peraturan turunannya yaitu:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP); dan
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sampai dengan saat ini bahwa seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berjumlah 542 telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan dapat diperoleh gambaran bahwa setiap tahunnya TPID telah melakukan langkah-langkah strategis dan melakukan berbagai inovasi program kegiatan pengendalian inflasi untuk pencapaian sasaran target inflasi. Diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah dan beberapa regulasi yang sebelum-sebelumnya telah diterbitkan akan dapat mendukung dan terus dijadikan dasar bagi TPID dalam upaya pengendalian inflasi mulai dari aspek perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Peserta rakorpusda yang berbahagia,

Pada kesempatan ini pula Saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya kepada saudara-saudara sekalian, atas kerja keras dan upaya koordinasi yang telah dilakukan Saudara dan seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam menjaga realisasi inflasi daerah di tahun 2018.

Diharapkan bahwa langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan selama ini dapat kita pertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga keseimbangan inflasi terjaga dan pertumbuhan ekonomi stabil dan berkualitas.

Hadirin yang saya hormati,

Pada akhirnya Saya ingin menyampaikan kepada seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada Rakorpusda TPID ini, agar dapat saling memberikan masukan dan informasi serta bertukar pengalaman dalam hal upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan serta diimplementasikan di daerahnya masing-masing.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillaahi rahmannirrahiim, acara ***“Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019”***, secara resmi saya nyatakan dibuka, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan Taufik dan Hidayah-Nya serta

kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas ini. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

**Sekian dan Terima kasih,
Wabillaahit Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah**

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si